

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Enkulturasasi pertama kali diperkenalkan oleh Herskovits (1948) dalam bukunya yang berjudul *quot; Man and his work: The Study of Social Humanities "*; konsep Enkulturasasi dianggap sebagai suatu proses penting yang melibatkan pengkondisian sadar maupun tidak sadar yang dipandu oleh tradisi lokal. Herskovits melihat Enkulturasasi sebagai suatu proses yang tidak hanya bergantung pada adaptasi umum terhadap kehidupan sosial, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk solusi. Hubungan ini berlanjut dalam proses budaya, dan tanpa adanya adaptasi terhadap masyarakat sosial, proses Enkulturasasi atau pembudayaan tidak dapat berjalan dengan lancar. Enkulturasasi, (pembudayaan), merupakan suatu proses di mana individu mengalami pembelajaran nilai dan norma budaya sepanjang hidupnya.

Menurut E. Adamson Hoebel, Enkulturasasi mencakup keadaan di mana seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, memperoleh kompetensi dalam budayanya dan menginternalisasikannya. Identitas, yang merupakan identitas pribadi dalam suatu kelompok masyarakat, dihasilkan melalui proses Enkulturasasi. Masyarakat berusaha agar individu merasa bertanggung jawab, meskipun terkadang proses Enkulturasasi atau pembudayaan dapat menyebabkan isolasi sosial dengan tujuan membuat individu tersebut lebih konsisten. Bagian utama dari interaksi Enkulturasasi, khususnya pelatihan formal dan sekolah kasual. Yayasan pendidikan memberikan pelatihan formal, sedangkan sekolah kasual, atau disebut pelatihan remaja, diberikan oleh orang-orang terkasih. Ketika Enkulturasasi

dihubungkan dengan pendidikan formal, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan berpikir kritis.

Konteks definisi berpikir kritis ada beberapa indikator yang termasuk bagian dalam berpikir kritis, yaitu memecah perselisihan, mencapai tekad melalui pemikiran induktif atau logis, mensurvei atau menilai, dan sekadar memutuskan atau menangani masalah (Emily R. Lay: 2011). Sehingga, berpikir kritis menjadi esensial bagi semua individu. Keynes (2008) menyatakan berpikir kritis menjadikan pembaca untuk mengevaluasi bukti yang mereka baca dan mengidentifikasi alasan yang salah atau tidak rasional. Berpikir kritis membantu proses pembentukan argumen yang solid, seperti dalam tugas-tugas. Hal tersebut dapat diartikan bahwa individu menyelidiki dan mendukung setiap pernyataan dengan bukti yang telah dievaluasi.

Menurut H.A.R. Tillar (2011), berpikir kritis memiliki signifikansi dalam bidang pendidikan dengan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan mencerminkan penghormatan terhadap peserta didik sebagai individu, menunjukkan penghargaan terhadap keunikan setiap pribadi. Ini memberikan peluang bagi pengembangan pribadi yang holistik, memungkinkan siswa merasa memiliki kekuatan dan mendapat penghargaan terhadap hak-haknya dalam pengembangan diri. Kedua, berpikir kritis dianggap sebagai tujuan ideal dalam pendidikan karena membantu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa dewasa. Ketiga, pengembangan berpikir kritis dalam pembelajaran mengikuti gagasan tradisional tentang pencapaian dalam pelajaran alam terbuka, pelajaran alam, dan mata pelajaran lain yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

Keempat, dalam kehidupan demokrasi keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan. Demokrasi mempunyai kelebihan untuk tumbuh dan berkembang apabila warganya memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu politik, sosial, dan ekonomi.

Definisi tersebut saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang satu topik yang terkait dengan penanaman kemampuan berpikir kritis sebagai kriteria pembelajaran di abad ke-21, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan dan dikembangkan oleh berbagai negara di dunia. Misalnya, di Amerika dikenal dengan istilah *civic education*, di Singapura disebut *civic education* dan moral education, sedangkan di Indonesia disebut *civic education*. Terdapat berbagai pandangan mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Dalam *The Citizen and Civics* (1886), Henry Randall Waite menyatakan bahwa *civic* dapat diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan, yang membahas hubungan antara individu dalam perkumpulan yang terorganisir.

Edmonson (1958) berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah studi pemerintahan yang relevan dengan kewajiban dan hak warga negara. Kewarganegaraan menjadi bagian dari ilmu politik yang mengkaji tanggung jawab dan hak warga negara. Stanley E. Dimond (1961) menyatakan bahwa kewarganegaraan memiliki dua makna, yaitu status hukum yang terkait dan tindakan politik seperti pemilihan umum mayoritas, lembaga pemerintahan, hukum, dan kewajiban. Azymurdi Azra (1999) menyatakan pendidikan kewarganegaraan dikembangkan untuk melatih generasi milenial sehingga mengubah warga negara yang cerdas, menyadari hak serta tanggung jawab

mereka dalam kehidupan masyarakat bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membangun kesiapan warga negara untuk menjadi anggota masyarakat global yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban.

pandangan dari keempat tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan bersifat umum, dan tidak hanya dalam konteks sekolah, tetapi dalam community civics yang menekankan hubungan antar warga negara, individu, pemerintahan, serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat global. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi dalam pola pikir, sikap, dan tindakan individu menuju arah yang diinginkan. Sehingga, Pengajaran adalah suatu pekerjaan yang disengaja dan terorganisir untuk membangun suasana belajar dan pengalaman berkembang yang secara efektif menumbuhkan kemampuan peserta didik. Esensi dari pendidikan adalah membantu peserta didik memiliki kemampuan magic, pengendalian dan pengembangan kepribadian, peningkatan kecerdasan, dan pengembangan kemampuan yang diperlukan untuk menghidupi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa, sebagaimana diatur dalam Sistem Sekolah Negeri sebagaimana ditentukan dalam peraturan nomor 20 Tahun 2003.

Tujuan dari pendidikan kewarganegara adalah memberdayakan dan memperkuat pengetahuan serta keterampilan dasar peserta didik yang berkaitan warga Negara Indonesia mengingat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemampuan tersebut dimaksudkan agar siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai wawasan luas, berwawasan luas dan tercerahkan, berpikir fundamental, rasional, bermoral, berselera dan dinamis. Pada saat ini, kita memasuki dan menghadapi abad ke-21, dimana teknologi mengalami transformasi yang sangat cepat.

Teknologi dalam dua dekade terakhir telah menjadi bagian penting dari rutinitas kita sehari-hari. Hiburan berbasis web seperti Facebook, Twitter, Instagram, Friendster, dan lainnya mulai dikenal abad ini. Dampaknya turut memengaruhi sistem belajar siswa, dan konsep pembelajaran abad-21 muncul. Pembelajaran abad ke-21 mengintegrasikan literasi, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan penguasaan teknologi. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi, memiliki literasi yang baik, dan berbudi pekerti yang positif.

Keterampilan yang perlu dikuasai pada abad ke-21 dikenal dengan istilah 4C, yang melibatkan inovasi dan kreatif, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis serta pemecahan masalah. Pembelajaran di abad ke-21 harus berlandaskan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), seperti dijelaskan oleh para ahli. Pendekatan yang diusulkan mencakup pembelajaran yang terpadu, melibatkan belajar dari guru, belajar dari sesama siswa, dan belajar dari diri sendiri. Pada abad ke-21, guru diharapkan menjadi kreatif dan mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan media sosial, dalam proses pembelajaran.

Beberapa esensi yang direkomendasikan mencakup peran guru sebagai perancang pembelajaran, integrasi unsur HOTS, penerapan pendekatan dan model pembelajaran multifaset, serta penggunaan teknologi sekolah masa depan. Kemampuan berpikir kritis memiliki urgensi yang besar dalam mempersiapkan siswa untuk mengatasi masalah kompleks di dunia nyata. Hal ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan Negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengatasi masalah dalam lingkungan masyarakat.

Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan pola dalam kegiatan pembelajaran guru. Tugas guru tidak lagi hanya pusat pembelajaran, tetapi menjadi fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang memacu kreativitas sehingga peserta didik termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran (Rusadi et al., 2019).

B. Identifikasi Masalah

Minim nya proses penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam pelajaran Pendidikan Pancasila kelas VII di SMP Negeri 8 Malang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dengan judul “ Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Siswa kelas VII SMP Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis” dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Siswa kelas VII di SMP Negeri 8 Malang?
2. Bagaimana Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas VII Smp Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis?
3. Apa hambatan dan solusi dalam proses Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas VII Smp Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pembelajaran Pendidikan Pancasila siswa kelas VII di SMP Negeri 8 Malang.
2. Menjelaskan Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas VII Smp Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis.
3. Menganalisis hambatan dan solusi dalam proses penerapan Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas VII Smp Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memperluas informasi pengetahuan dan ilmu di bidang pendidikan, tentang berpikir kritis sebagai kriteria pembelajaran abad 21.
 - b. Menjadi acuan peneliti berikutnya dalam mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis sebagai kriteria pembelajaran abad 21.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Lembaga(Sekolah)

Hasil penelitian ini sangat penting terutama bagi sekolah karena dapat menginspirasi guru dan murid mengenai Enkulturasi (pembudayaan) berpikir kritis sebagai strategi penerapan kriteria pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas VII.

b. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian tersebut bermanfaat bagi stakeholders dalam bidang pendidikan, sehingga memberikan inovasi dan meningkatkan sumber daya Manusia, serta mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter melalui enkulturasi berpikir kritis.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan intelektual dan pengalaman tentang Enkulturasi berpikir kritis sebagai kriteria pembelajaran di abad 21 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila siswa SMP kelas VII.

F. Batasan Istilah

Batasan masalah merupakan suatu persoalan yang dikaji dalam penelitian, hal ini bertujuan memfokuskan esensi dari persoalan yang dikaji tidak melebar yang menyebabkan tidak tercapainya substansi penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis juga perlu membatasi persoalan dalam penelitian yang membahas tentang Enkulturasi berpikir kritis sebagai strategi penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila siswa kelas VII.

1. Penerapan kriteria pembelajaran abad 21.
2. Memberikan pemahaman pentingnya Enkulturasi berpikir pada pembelajaran abad 21.
3. Objek dan sasaran penelitian ini Siswa kelas VII SMP Negeri 8 Malang, terkhusus dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

G. Penegasan Istilah

Judul skripsi yaitu Penerapan kriteria pembelajaran abad 21 dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas VII Smp Negeri 8 Malang melalui enkulturasi berpikir kritis. Untuk memperkecil kesalahan dalam pemahaman judul skripsi yang telah disusun, Maka penelitian perlu memberikan penegasan istilah yang ada di dalam nya.

1. Kriteria Pembelajaran abad 21

Memasuki abad ke-21, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia berfokus pada kompetensi abad ke-21. Kompetensi ini digunakan sebagai pedoman untuk membangun individu yang dapat bersaing di dunia kerja. Pada abad kedua puluh satu, pembelajaran telah berkembang menjadi metode untuk memperoleh kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Kompetensi abad ke-21 adalah kumpulan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan zaman. Mereka biasanya disebut 4C. Kemampuan penalaran inventif, penalaran tegas dan berpikir kritis, korespondensi dan usaha bersama merupakan keterampilan abad ke-21 yang dimaksud. Dalam proses pembelajaran, kompetensi 4C tersebut mulai ditanamkan dengan baik.

2. Enkulturasi

Havilland (2009) mengatakan bahwa enkulturasi adalah praktik instruktif yang dilakukan oleh seorang individu. Hal ini umumnya berasal dari tradisi atau adat istiadat penting masyarakat umum yang berhubungan dengan makanan,

rumah aman, dan keamanan, dan bahwa praktik pendidikan anak pada akhirnya menghasilkan karakter tertentu di masa dewasa. Menurut Koentjaraningrat (1997), mata kuliah “pembangunan” adalah metode yang meliputi pembelajaran dan penyesuaian pertimbangan dan mentalitas seseorang terhadap adat istiadat. Enkulturasasi merupakan suatu susunan standar dan pedoman yang ada pada suatu kebudayaan.

3. Berpikir Kritis

Menurut Purwanto (2007), berpikir kritis adalah tindakan pribadi yang dilakukan oleh orang-orang yang menghasilkan temuan yang menuju suatu tujuan. Orang berusaha untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Berpikir kritis adalah penalaran yang bertujuan untuk mempelajari situasi, fenomena, masalah, atau pertanyaan untuk membuat hipotesis atau kesimpulan yang dapat dibenarkan dengan menggabungkan semua informasi yang ada.